

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan sangat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Kita tau, perbankan mempunyai pangsa pasar besar kurang lebih sekitar 80 persen dari keseluruhan sistem keuangan yang ada. Begitu besar peranan perbankan di Indonesia, maka pengambil keputusan perlu melakukan evaluasi kinerja agar bisa lebih baik lagi.

Pembangunan suatu bangsa dan pembangunan ekonomi bergantung pada perkembangan dan peranan lembaga keuangan seperti perbankan yang di perlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam suatu perekonomian. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2005).

Menurut Rodoni (2007), Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-asset keuangan maupun non-financial asset atau asset riil. Di Indonesia lembaga keuangan di bagi menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan

lembaga keuangan bukan bank. lembaga keuangan bank juga di bagi menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank merupakan jantung perekonomian pada suatu negara begitu juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR juga salah satu lembaga keuangan yang di harapkan mampu menjalankan fungsi untuk menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah.

Menurut otoritas jasa keuangan (OJK), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada pun Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sama halnya bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) sebesar 10,25% sedangkan bank umum sebesar 7,75%. Dengan demikian BPR dapat memberikan bunga tabungan yang lebih tinggi. Sementara itu total asset Indonesia dengan jumlah BPR 1634 mengalami peningkatan perkembangan jumlah asset skala nasional pada periode April 2016 – September 2016, pada bulan April total aset sebesar 104,631,651,692 milyar, bulan Mei sebesar 105,680,675,733 milyar, bulan Juni sebesar 105,860,438,133 milyar, bulan Juli sebesar 107,169,206,527 milyar, bulan Agustus sebesar 108,045,217,796 milyar, dan pada bulan September naik yaitu sebesar 108,954,807,316 milyar (Bank Indonesia, 2016).

Di Indonesia sendiri sudah banyak BPR yang bergerak aktif terbagi atas beberapa provinsi. Berdasarkan data yang di akses BI Jumlah BPR Konvensional Berdasarkan Badan Hukum skala Nasional Periode : Agustus 2016 Pada perkembangan nya BPR nasional mengalami peningkatan terbukti dari jumlah BPR pada setiap provinsi yang ada di Indonesia yaitu sekitar 1634 BPR dari 33 provinsi yang ada di indonesia. Sebagian BPR terbanyak berada provinsi Jawa Timur dengan jumlah 321 BPR, Di susul provinsi Jawa Barat dengan jumlah 296 BPR, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 252 BPR, provinsi Bali dengan

jumlah 137 BPR, provinsi Sumatra Barat dengan jumlah 91 BPR, provinsi Banten dengan jumlah 64 BPR, provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 55 BPR, provinsi D.I Yogyakarta dengan jumlah 53 BPR, provinsi Riau dengan jumlah 34 BPR, provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 29 BPR, sedangkan provinsi Lampung dengan jumlah 26 BPR dan seterusnya. Dari 11 sampel provinsi BPR nasional tersebut terlihat bahwa jumlah BPR terbanyak yaitu provinsi Jawa Timur, sedangkan di provinsi Lampung sendiri memiliki jumlah 26 BPR. Pada BPR khususnya Provinsi Lampung pada tahun 2016 jumlah asset mengalami peningkatan dari bulan Juli sampai September.

Aset merupakan jasa yang akan datang dalam bentuk jasa atau uang dimasa mendatang yang bisa ditukarkan menjadi uang (kecuali jasa yang timbul dari kontrak yang belum dijalankan kedua pihak secara sebanding) yang di dalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum dan keadilan (Scanning, 1992). Pada BPR provinsi Lampung sendiri jumlah asset yang dimiliki sangat besar di banding dibandingkan Provinsi lain yang ada di pulau Sumatra.

**Tabel 1.1**  
Perkembangan Jumlah Aset di Pulau Sumatra  
Periode Juli 2016 - September 2016 (dalam juta Rp)

Provinsi	Juli	Agustus	September
Provinsi NAD	244,019,650	243,343,624	244,294,201
Provinsi Sumut	1,272,667,147	1,297,601,699	1,313,894,110
Provinsi Sumbar	1,433,629,982	1,459,816,524	1,482,566,758
Provinsi Riau	1,244,055,352	1,259,589,412	1,258,968,836
Provinsi Jambi	772,399,081	785,310,784	777,308,179
Provinsi Sumsel	1,276,103,979	1,307,792,784	1,306,595,280
Provinsi Bengkulu	61,881,837	65,783,130	65,705,862
Provinsi Lampung	9,157,195,940	9,155,847,393	9,422,706,862
Provinsi Kep.Babel	113,993,515	114,896,082	113,801,359

Sumber : Bank Indonesia, 2016

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 periode tersebut pada perkembangannya jumlah aset di provinsi Lampung sendiri begitu besar dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Jumlah aset di Provinsi Lampung mengalami kenaikan walaupun pada bulan Agustus sedikit menurun namun pada bulan September 2016 naik sebesar 9,422,706,862 milyar.

Kegiatan bank dalam penyaluran dana kepada pihak lain, yang paling besar dalam bentuk kredit. Dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif yang terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibandingkan aktiva produktif lainnya. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Ismail, 2010: 190). Dalam hal ini pada perkembangan kredit pada BPR provinsi lampung di pulau Sumatra sendiri sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
Perkembangan Kredit BPR Konvensional Pulau Sumatra  
Periode Juni 2013 – Agustus 2013 (dalam juta Rp)

Provinsi	Juni	Juli	Agustus
Provinsi NAD	114,102,175	117,392,913	116,494,892
Provinsi Sumut	708,742,364	722,914,416	717,203,705
Provinsi Sumbar	1,076,708,319	1,069,277,910	1,048,393,999
Provinsi Riau	731,830,804	742,562,220	734,909,823
Provinsi jambi	554,232,766	564,788,036	564,479,742
Provinsi Sumsel	772,134,575	772,125,471	767,606,421
Provinsi Bengkulu	31,904,978	32,150,706	30,771,232
Provinsi Lampung	5,187,244,961	5,271,546,969	5,309,016,727
Provinsi Kep.Babel	40,025,765	41,142,209	42,566,314

Sumber : Bank Indonesia, 2016

Dari Tabel 1.2 perkembangan kredit BPR pulau Sumatra, kredit di provinsi Lampung sendiri tertinggi dibandingkan dengan provinsi di pulau Sumatra lainnya. Dan pada Juni 2013 – Agustus 2013 mengalami peningkatan yaitu pada bulan Juni sebesar 5,187,244,961 milyar, dilanjutkan pada bulan Juli sebesar 5,271,546,969 milyar, dan pada bulan Agustus 5,309,016,727 milyar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa industri BPR di provinsi Lampung menunjukkan kinerja cukup baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Beberapa penelitian yang sama sudah dilakukan sebelumnya mengenai variabel CAR, LDR, BOPO terhadap ROA yaitu pada hasil penelitian Erfendi,

dkk. (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh CAR, BOPO, dan LDR terhadap ROA pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Palembang, menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan hipotesis kedua menyatakan Biaya BOPO berpengaruh terhadap ROA dan hipotesis ketiga menyatakan LDR berpengaruh terhadap ROA. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan Hardiyanti (2012) yang juga melakukan penelitian tentang analisis pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap ROA di Indonesia, menyatakan hasil penelitian CAR dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA sedangkan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Ariffudin (2012) juga melakukan sebuah penelitian yang hampir sama tentang Analisis pengaruh CAR, LDR, BOPO dan NPL terhadap ROA BPR wilayah Sulawesi Selatan dengan BPR wilayah Iramasuka menyatakan bahwa CAR, BOPO dan LDR secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, secara parsial CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, NPL dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka diharapkan terjadi peningkatan kinerja BPR khususnya provinsi lampung dengan melihat total asset dan perkembangan kredit BPR provinsi Lampung sehingga akan mampu memberikan kinerja yang bagus bagi BPR dan juga memberikan pengaruh positif pada perbankan juga pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung. Maka dari itu penulis mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARHI**

## **KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI PROVINSI LAMPUNG”**

### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diambil penulias dalam penelitian ini adalah tempat penelitian BPR yang berada di provinsi Lampung. Selain itu peneliti mengambil sebelas sample BPR di kota Bandar Lampung. Adapun jenis BPR yang dimaksudkan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah seberapa optimal dan seberapa besar pengaruh dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan operasional (BOPO) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) yang merupakan ukuran penting bagi bank karena dengan menggunakan ROA memperhitungkan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan, semakin besar ROA semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi aset. ROA bersumber dari laba sebelum pajak dan total aset.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Lampung ?

2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Lampung ?

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat yang berada di provinsi Lampung
2. Menganalisis pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat yang berada di provinsi Lampung
3. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat yang berada di provinsi Lampung

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat tentang kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di provinsi Lampung.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa masukan dan sebagainya terhadap bank-bank di provinsi Lampung khususnya

bank perkreditan rakyat serta sebagai bahan untuk pertimbangan pemerintah daerah maupun negara dalam menentukan kebijakan perkembangan perekonomian dalam ikut serta terhadap pertumbuhan perekonomian di provinsi Lampung.

### 3. Bagi pengembangan keilmuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi civitas akademika khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus menambah koleksi dan referensi tambahan pengetahuan untuk perpustakaan UMY